

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA
PASCAPERCELAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II B
BANTAENG
(Studi Kasus Putusan No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:
NURSYAMSI
NIM: 10100112066**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursyamsi
NIM : 10100112066
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Tempat/tgl. Lahir : Bongkina, 28 juli 1994
Alamat : Paccinongang
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian
di Pengadilan Kelas II B Bantaeng (Studi Putusan
Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 8 Februari 2016

Penyusun,

NURSYAMSI
NIM : 10100112066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Kelas II B Bantaeng (Studi kasus putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg)" yang disusun oleh Nursyamsi Nim 10100112066, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 17 Maret 2016 M.
08 Jumadil akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Munir Salim, M.H	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A Qadir Gassing, HT,M.S.	(.....)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, S.Ag. M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016199031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil' Alamin penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II B BANTAENG (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg). Serta Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi, penulis tak pernah menyerah karena penulis yakin ada Allah swt. yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga terutama kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dan doa yang tidak putus-putusnya buat penulis, sungguh semua itu tak mampu penulis gantikan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Ayahanda **Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ayahanda **Dr. Supardin, M.HI.** selaku Ketua dan Ibunda **Dr. Hj. Patimah, M. Ag** selaku Sekretaris Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ayahanda **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing., HT, M.S.** selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Ibunda **A. Intan Cahyani., S.Ag, M.Ag.** selaku pembimbing II penulis, yang tiada henti memberikan semangat dan masukan sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberi

bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Peradilan Agama Angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberikan semangat dan dukungan selama di bangku perkuliahan memberikan kebersamaan dan keceriaan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku TR Community (**Dekal, Asril, Hijri, Eka, Eno, Ibet, Kasma, Inha, Syatriah, Riska**) sekaligus yang selama di bangku perkuliahan maupun di luar kampus memberikan kebersamaan dan keceriaan serta banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta untuk orang yang selalu memberikanku dukungan dan motifasi **Ahmad Asif Sardari**. Yang berkat dukungan penuh dan menjadi inspirator serta inisiator penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikiakan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Harta Bersama.....	11
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	13
C. Dasar Hukum pembagian Harta Bersama Pascaperceraian	17
D. Pengertian Perceraian.....	19
E. Bentuk dan Tata Cara Perceraian	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian	47

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
--	----

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan	49
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Bantaeng.....	49
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bantaeng	50
3. Visi dan Misi	53
4. Struktur Organisasi	53
B. Hasil penelitian	55
1. Proses Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantaeng	55
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam Perkara Harta Bersama Nomor 68/Pdt.G/2014/PA. Batg	57
3. Alasan Majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg	70
C. Analisa Penulis	72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
-----------------------------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (أ) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Nursyamsi

Nim : 10100112066

Judul : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama
Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg)

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng dalam putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA. Batg. Pokok masalah tersebut dibagi dalam dua sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: 1). Apakah Putusan Majelis Hakim dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?. 2). Apakah alasan majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg?

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan empiris. Data diperoleh dari Hakim aktif, dan Pegawai di Pengadilan Agama Bantaeng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau refrensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa: 1) Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu menolak gugatan penggugat berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung sesuai Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” demikian juga Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, yang menyatakan “ Petitum tidak sesuai dengan posita, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). 2) Alasan Majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg yaitu: Bahwa posita gugatan pada point 1, 2, dan 4 sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), menimbulkan kerancauan berfikir yaitu dengan menyebutkan adanya harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh setelah perkawinan namun setelah majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai keberadaan semua harta yang didalilkan oleh penggugat, ternyata penggugat mengakui di depan Majelis Hakim bahwa semua harta penggugat telah dijual oleh tergugat sebelum penggugat memasukkan gugatan penggugat ke Pengadilan Agama Bantaeng pada saat itu penggugat sedang berada di Kalimantan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir bathi. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al Rum/30: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah, sejalan dengan tujuannya, perkawinan memiliki berapa hikmah atau keuntungan bagi sejumlah orang yang melakukannya. Dalam mengayu biduk rumah tangga tersebut, pada kenyataannya selalu ada aral dan cobaan yang merintang. Seringkali cobaan itu

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta : Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Quran,2002), h.644.

berupa ketidak harmonisan pasangan, yang pada gilirannya seringkali berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersuami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh disepanjang kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nisa/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada diantara suami istri berbuat diluar hak dan kewajibannya maka Islam memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat diatasi lagi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu adalah perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Mengenai dengan hal perceraian yang dipandang dari sudut hukum Islam (fiqh), maupun dari sisi peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. Perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan tersebut, serta kewenangan lembaga peradilan terhadap putusnya perkawinan itu. Perceraian mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan selama perkawinan (harta bersama).

Harta merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting, harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.²

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008).
h. 108

Pada beberapa daerah di Indonesia harta bersama diatur dalam Perundang-undangan, telah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, sesuai dengan bahasa daerah masing-masing, misalnya di Jawa timur disebut *gono-gini*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, dan di Banda Aceh disebut *hareuta-sauhareukat*.³

Harta bersama inilah yang akan menjadi ajang persengketaan dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya.

Menurut pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

Apabila perkawinan putus karna perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴

Bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam, yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan harta bersama setelah perceraian akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam pasal 37 tersebut sudah mendapat kepastian positif, yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Menetapkan pembagian harta bersama dibagi dua, setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Alasan-alasan penggugat benar atau tidak harus dibuktikan sehingga Hakim yakin, dan perkara tersebut dapat diputus. Penyelesaian kasus pembagian harta bersama di Pengadilan

³M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Makassar; Alauddin University Press. 2012), h. 142

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 13

sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus kasus harta bersama di Pengadilan Agama yang berdasar pada Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Al-Quran, hadits atau pun dalam kitab fiqh klasik tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai Harta Bersama dalam perkawinan. Meskipun Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Pasal 35 ayat (1), 36 dan 37. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, maka masalah pembagian Harta Bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah Lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.

Dalam syari'at Islam seorang Hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang di ambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara'. Dan hasil pertimbangan Hakim tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Sebagai penegak keadilan, Hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan yang ditetapkan oleh syaria'at. Hakim dilarang mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran. Karena apabila hukum di tegakkan secara adil sesuai syari'at maka terciptalah perdamaian dalam masyarakat. Sehingga begitu pula yang harus diterapkan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa memihak salah satu pihak dan bersikap adil.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan pada harta istri.

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikut sertakan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama yang dilakukan setelah putusannya perkara perceraian.

Sebagaimana penjelasan tersebut maka dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg. Dimana pasangan suami istri yang telah resmi bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk membuka sidang kembali yang mana gugatan tersebut mengenai Harta Bersama.

Pengadilan agama Bantaeng sebagai suatu lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang masuk, termasuk pembagian harta kekayaan

suami istri, mempunyai hak dan wewenang untuk menyelesaikannya dengan merujuk kepada hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama.⁵

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Judul penelitian ini adalah “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan Nomor. 68/Pdt.G/2014/PA. Batg)”. Dan untuk menghindari adanya kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yakni sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan.⁶

2. Perkara

Perkara adalah Masalah, persoalan atau urusan yang perlu atau ingin diselesaikan.⁷

⁵ H. Abd Rahman, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 72

⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, Widya Karya. 2005). h. 371

3. Harta bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.⁸

4. Perceraian

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutann.⁹

Jadi berdasarkan pengertian kata penting diatas kemudian diberi pengertian judul secara operasional bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian adalah suatu perbuatan dengan cara menyelesaikan persoalan Harta bersama yaitu harta yang dimiliki keduanya dan diperiksa dalam satu pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama setelah putusnya perceraian.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang tersebut maka pokok masalah yang timbul adalah Bagaimana Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng dalam Perkara putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg?

Adapun sub masalahnya dalam penelitian ini adalah:

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. h. 374

⁸H. Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 161

⁹H. Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Palu; Sinar Grafika, 2006), h. 73

1. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah alasan majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg?

D. Kajian Pustaka

Eksistensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku menjadi rujukan dan tentunya relevan atau terkait dengan judul skripsi penulis yakni: Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg). Buku yang menjadi rujukan dalam Pembuatan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara
2. Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buku ini berisi tentang Bagaimana cara Praktek dalam berpekara perdata di pengadilan Agama.
3. Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. Buku ini berisi tentang Perceraian.
4. Abdul Rahman, 1995. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Akademika Presindo. Buku ini berisi tentang Hukum Perdata Islam yang tercakup tentang masalah harta bersama.

Selain buku-buku di atas, tentunya masih banyak lagi literatur-literatur yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui alasan majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin memberikan gambaran kepada pembaca mengenai porsi pembagian harta bersama pascaperceraian serta implementasi dalam putusan di Pengadilan Agama Bantaeng.
2. Kegunaan penelitian ini berupa telaah terhadap penyelesaian perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng . Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam Indonesia secara umum tentang Perkara Harta Bersama sebagai salah satu sumber hukum Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan Penyelesaian Perkara, khususnya mengenai Harta Bersama.

4. Berpartisipasi dan mensosialisasikan Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng
5. Menambah wawasan dalam memahami Penyelesaian Perkara Harta Bersama secara menyeluruh.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Harta Bersama

Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya didalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Demikian pula dalam kitab fikih klasik tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga.

Sekurang-kurangnya ada dua pola pandangan yang ditemui pada masyarakat Islam tentang harta yang diperoleh suami-istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan kepada dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan kepada petunjuk syariat Islam. Pertama, Masyarakat Islam yang memisahkan antara hak dan milik suami-istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami-istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampuradukkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan sendiri. Kedua, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi/*syirkah*. Jadi seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan

yang sah, dianggap harta bersama suami-istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Harta bersama suami-istri bersumber dari:¹

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan
 - b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama
 - c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri
 - d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami-istri
 - e. Segala penghasilan pribadi suami
 - f. Segala penghasilan pribadi istri
- Segala penghasilan harta bersama suami-istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*

Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 199 menyatakan: *“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut Hukum terjadi harta bersama*

¹ Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.246

menyeluruh antara suami-istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Harta bersama yaitu harta kekayaan yang dihasilkan melalui jerih payah suami atau istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, bukan harta yang berasal dari harta perorangan atau pribadi yang berasal dari pencaharian sendiri sebelum perkawinan, dan bukan pula harta yang diperoleh pada saat perkawinan melalui warisan, hibah dan hadiah.
2. Harta Pribadi yaitu Harta kekayaan perorangan baik itu harta perorangan suami atau harta perorangan istri yang berasal dari pencaharian masing-masing sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh terikat tali perkawinan melalui warisan, hibah, dan barang-barang hadiah.

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:²

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk mempertegas maksud dari pasal 35 tersebut diatas, akan dikemukakan uraian dari M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung RI). Beliau telah

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan*, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, 1991 (Jakarta: Intermasa) h.193

memformulasikan harta benda yang diperoleh suami-istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:³

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 803K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1971. Terhadap ketentuan ini, ada pengecualian yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli barang tersebut. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974, Tanggal 16 Desember 1975. Jadi, semua kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian harta tersebut.

³M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia*. h. 134

- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya selama masa perkawinan suami-istri itu mempunyai uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari hasil usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka. Dari uang tersebut kemudian suami membangun sebuah rumah dan membeli satu unit mobil. Kedudukan rumah dan satu unit mobil itu, menurut yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1970, termasuk kedalam obyek harta bersama suami-istri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung, suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami-istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.

- d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan, dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami-istri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum terjadi perkawinan, adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya si istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko, setelah perkawinan terjadi ruko itu disewakan, hasil sewanya dihitung sebagai harta bersama.
- e. Segala penghasilan suami-istri selama dalam perkawinan. Sumai yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

Undang-Undang perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan passiva.

Kompilasi hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda yang berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:⁴

⁴M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia*, h. 137

- a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
- b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
- c. Surat-surat berharga, seperti Obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll.

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa:

- a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

C. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian

Mulai perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan antara harta kekayaan suami istri. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang yang telah ada, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi percekocokan yang mengakibatkan perceraian.

Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perceraian juga akan menimbulkan akibat baik bagi suami maupun istri, juga terhadap anak-anaknya dan harta benda yang mereka miliki. Sehingga sering terjadi sengketa masalah pembagian harta bersama pascaperceraian.

Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pembagian harta bersama berdasarkan:

1. Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan *“hukumnya masing-masing”*, adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

2. Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama”.

Yang dimaksud dengan *“Separuh harta bersama”*, berarti apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka setengah dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi hak pasangan yang hidup terlama sedangkan yang separuhnya lagi dibagikan kepada para ahli waris sehingga menjadi harta waris dari salah satu pasangan yang meninggal.

3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Yang dimaksud *“Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* ialah setiap pasangan yang telah bercerai baik secara cerai talaq atau cerai mati masing-masing berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama sepanjang mereka tidak membuat perjanjian pranikah.

Berdasarkan dari beberapa pasal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa harta bersama suami-istri apabila putus dikarenakan perceraian ataupun kematian maka kepada suami-istri masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama.

D. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dibenci oleh Allah swt. karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Antara perceraian dan Talaq tidak ada perbedaan, kalau cerai berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan talaq berasal dari bahasa Arab. Namun dari segi pengertian hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talaq dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa.⁵

Jadi pengertian Perceraian (Talaq) menurut bahasa adalah membuka ikatan, melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut Istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talaq atau perceraian.⁶

Menurut pasal 38 Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus, karena:⁷

⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 274

⁶H. Djaman Nur, *Fiqh munakahat* (Bengkulu: Dina utama semarang, 1993) h.134

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Peradilan Agama, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h.194

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami istri disebut juga oleh masyarakat dengan cerai mati.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan Cerai hidup. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua jenis yaitu:

- a. Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.⁸
- b. Cerai Talaq yaitu ikrar seorang suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁹

3. Putusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukupan alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁸H. Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 81

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 358

- c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu, atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta didaftarkan pada catatansipil dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas ditengah jalan karena sebab-sebab tertentu. Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan. Pengertian Zina pada alasan perceraian ini adalah zina menurut konsep Agama. Pengertian pemabok, pemadat, penjudi ditafsirkan oleh Hakim.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunnya. Waktu 2 (dua) tahun pada alasan perceraian ini, adalah untuk menciptakan kepastian Hukum. Kata “berturut-turut” adalah berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2 (dua) tahun lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini adalah melindungi.
- c. Kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud “hal lain diluar kemampuannya” pada alasan perceraian ini, maka Hakim yang menentukannya.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. “Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat” maksudnya adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri.

- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaiknya ada visum dari Dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang mengalami kekejaman atau penganiayaan. Selain itu juga perlu ada ketengan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman atau penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-Undang tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga Hakimlah yang harus menafsirkan.
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Tujuan dari alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak yang mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan

perceraian diajukan kepada Pengadilan. Undang-Undang tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini Hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut.

- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan antara suami dan istri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang relatif sifatnya karena Hakimlah yang menilai dan menetapkan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tidak dapat dicapai oleh suami istri maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut diatas.

E. Bentuk dan Tata Cara Perceraian

Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam

perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut Hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar Talak. Dengan demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar Talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar Talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana dikehendaki oleh agama Islam.¹⁰

1. Cerai Talaq

Permohonan Cerai Talaq diatur dalam pasal 66-72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 14-18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab XVI pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus.

Tatacara penyelesaian permohonan cerai Talaq diatur sebagai berikut:¹¹

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang.

¹⁰Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama* , h. 206

¹¹Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, h. 207

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²
 2. Permohonan cerai Talaq, meskipun memakai istilah permohonan tapi harus diproses sebagai perkara contentius, karena didalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum.
- b. Surat permohonan cerai talaq

Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.¹³ Permohonan tersebut diatas memuat:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talaq.¹⁴

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri. Alasan-alasan untuk melakukan

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Peradilan Agama*, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h.194

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama*, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h.283

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , Tentang Peradilan Agama*, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h.284

perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan pasal 39 (2) UUP, pasal 19 PP. No. 9/1975, pasal 166 KHI. Petitum dalam surat permohonan cerai talaq dapat berbunyi:

1. “Mengabulkan permohonan Pemohon”
2. “Menetapkan, mengijinkan kepada pemohon A untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon B didepan sidang Pengadilan Agama.”
3. “Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talaq Pemohon dimaksud”.
4. “Menetapkan biaya menurut hukum”

Sesuai apa yang dikehendaki oleh pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975, pasal 66 ayat (1) UU-PA.

c. Kewenangan relatif pengadilan Agama

Permohonan cerai Talaq diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali dalam hal:

- a. Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditempati bersama tanpa ijin pemohon, maka permohonan cerai talaq diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
- b. Termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
- c. Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁵

Permohonan cerai talaq diproses di kepaniteraan gugatan sebagai perkara kontentius dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan pihak-pihak

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talaq dilakukan menurut ketentuan pasal 26,27,28, dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagai berikut:

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian, baik suami ataupun istri atau kuasa mereka akan dipanggil untuk mengadiri sidang tersebut.
2. Panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita Pengganti.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai ditempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* , Tentang Peradilan Agama, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h. 283

4. Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Suami maupun istri atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada termohon dilampiri dengan salinan surat permohonan.
6. Apabila tempat kediaman tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:
 - a. Menempelkan surat permohonan/surat panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.
 - b. Mengumumkannya melalui surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
 - c. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - d. Tenggang waktu antara panggilan terakhir tersebut diatas dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
 - e. Dalam hal sudah dilakukan panggilan seperti tersebut di atas dan termohon atau kuasanya tetap tidak hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya termohon, kecuali apabila permohonan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

- f. Tata cara pemanggilan tersebut diatas berdasarkan aturan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan khusus (*Lex specialist*).
 - g. Dalam hal termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil menurut pasal 27 tersebut, maka dapat diputus dengan verstek.
 - h. Dalam hal Hakim akan menjatuhkan putusan verstek, sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi.
 - i. Apabila pada sidang pertama tersebut, pemohon belum siap dengan alat-alat buktinya maka sidang dapat ditunda untuk keperluan itu.
 - j. Dalam hal sidang ditunda maka termohon tidak perlu dipanggil lagi, karena panggilan terhadap termohon adalah untuk persidangan dan bukan untuk sekali sidang.
 - k. Apabila alasan cerai telah terbukti, perkara perceraian diputus dengan vertek.
7. Apabila termohon berkediaman diluar negeri, panggilan disampaikan melalui Perwakilan R.I setempat berdasarkan pasal 28 PP. No. 9 Tahun 1975:
- a. Panggilan tersebut dikirim lewat Departemen yang akan diteruskan KBRI yang dituju.

- b. Sidang pemeriksaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya perkara di Kepaniteraan Pengadilan agama.
- c. Apabila termohon telah dipanggil namun tetap tidak hadir dipersidangan, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
- e. Pemeriksaan

Pemeriksaan permohonan cerai talaq dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai-talaq didaftarkan di kepaniteraan.¹⁶ Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi.¹⁷ Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan:

- a. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yaitu dalam keadaan normal dimana para pihak ada dalam satu wilayah hukum pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia.
- c. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, yaitu apabila termohon berkediaman di luar negeri.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* , Tentang Peradilan Agama, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*,h. 284

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975* , Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h. 284

- d. Menurut kebijaksanaan Hakim, yaitu dalam hal-hal yang lain diluar yang telah diatur tersebut diatas, seperti misalnya jika salah satu pihak darisuami istri berada di wilayah hukum Pengadilan lain. Hakim dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimahnya panggilan tersebut oleh pemohon maupun termohon atau kuasa mereka.

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dalam sidang dimulai dengan memeriksa relaas panggilan, apakah pihak-pihak telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian pula pada sidang tundaan. Pada sidang pemeriksaan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan kepada kuasanya tidak mengurangi kewenangan Hakim untuk mendengar langsung dari yang bersangkutan.

f. Kumulasi perkara

Permohonan soal persoalan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talaq atau pun sudah ikrar talaq diucapkan. Kumulasi perkara ini merupakan ketentuan khusus. Kumulasi dapat diterima apabila:¹⁸

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, h. 213

- a. Diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talaq (dimuat dalam surat permohonan).
- b. Disertai dengan alasan masing-masing.
- c. Diajukan sebagai rekonsensi dan memenuhi rekonsensi.

Hakim berkuasa untuk menimbang, apakah penggabungan tersebut dapat diterima dan diputus sekaligus bersama-sama permohonan cerai talaq, atau memisahkannya dengan pokok perkara agar diajukan setelah ikrar talaq diucapkan.

g. Upaya perdamaian

1. Upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh dari pada perkara perdata pada umumnya, apalagi jika mereka telah mempunyai anak.
2. Tata cara perdamaian diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam sidang pertama, Hakim wajib berusaha mendamaikan suami istri yang akan bercerai.
 - b. Dalam sidang perdamaian, suami-istri harus hadir secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
 - c. Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka pemohon pada setiap sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

- d. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
 - e. Dalam mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu misalnya BP.4.
3. Apabila tercapai perdamaian, artinya suami-istri tidak jadi bercerai, maka perceraian dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian seperti halnya dalam perkara perdata umumnya, melainkan dibuat “penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkara telah dicabut dan dicoret dari Register Induk Perkara yang bersangkutan, serta menyatakan kedua belah pihak (suami-istri) masih berkaitan dalam perkawinan. Tetapi apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.
- h. Pembuktian dalam perceraian

Hukum pembuktian dalam perkara perceraian diatur secara khusus dengan melihat secara rinci alasan-alasan perceraian itu sendiri.
 - i. Putusan

Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan cerai talaq dan berkesimpulan bahwa:

- a. Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian
- b. Alasan-alasan cerai telah terbukti
- c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan putusan Hakim yang mengabulkan permohonan cerai talaq tersebut harus berbentuk “PUTUSAN” dengan amar berjudul “MENETAPKAN”, kecuali ada amar yang bersifat kondemnatoir, maka amar berjudul “MENGADILI”. Terhadap putusan tersebut, pihak istri (termohon) dapat mengajukan banding atau kasasi.

j. Biaya perkara

Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.¹⁹ Jika dalam perkara ini ada rekompensi, atau disertai dengan pembagian harta bersama, biaya perkara dapat dibagi dua (dipikul bersama).

k. Sidang penyaksian ikrar talaq

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talaq dalam suatu “Penetapan”, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Tata cara pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan ps. 390 HIR/ ps.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Perkawinan*, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, h. 288

718 R.Bg. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu okta otentik untuk mengucapkan ikrar talaq, mengucapkan ikrar talaq yang dihadap oleh istri atau kuasanya. Jika istri telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak datang sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talaq tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Jika suami telah dipanggil dengan patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaqnya didepan sidang, tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka kepadanya diberi tenggang waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talaq tersebut. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak datang lagi untuk melaporkan diri bahwa ia ingin mengucapkan ikrar talaq, maka gugurlah kekuatan putusan (ijin ikrar talaq) tersebut, dan perceraian itu tidak dapat lagi diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dalam hal tersebut diatas, maka hakim membuat “Penetapan” yang menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talaq habis dan kekuatan putusan telah gugur. Penetapan tersebut dicatat dalam Register induk perkara yang bersangkutan. Jika dalam tenggang 6 (enam) bulan tersebut, suami tersebut melaporkan diri bahwa ia tetap bermaksud untuk mengucapkan ikrar talaq, maka Pengadilan Agama dapat membuka sidang lagi guna penyaksian ikrar talaq dimaksud dengan memanggil suami-istri atau wakilnya. Sidang penyaksian ikrar talaq terbuka untuk umum. Dalam

sidang tersebut, suami tersebut mengucapkan ikrar talaq. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talaq ini dalam berita acara persidangan. Hakim membuat “Penetapan” yang isinya “Menetapkan perkawinan antara pemohon..... dengan termohon putus karena perceraian”, penetapan mana diucapkan dalam sidang itu pula. Perkawinan putus sejak ikrar talaq diucapkan didepan sidang. Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.

1. Akta Cerai

Berdasarkan atas penetapan akta cerai tadi, maka panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada bekas suami-istri bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya perceraian.

2. Cerai Gugat

Gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, pasal 73-88 UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara penyelesaian cerai gugat diatur sebagai berikut:²⁰

a. Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama

Cerai gugat diajukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam. Gugatan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, h. 224

b. Surat gugatan cerai

Surat gugatan cerai memuat:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman penggugat, yaitu istri, dan tergugat yaitu suami.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian.
- c. Petitum perceraian

Gugatan cerai dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 dan 51 Kompilasi Hukum Islam.

c. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Gugatan cerai diproses di Kepaniteraan Gugatan dan dan dicatat dalam Registre Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan pihak-pihak

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai gugat dilakukan sama dengan panggilan dalam perkara cerai talaq. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada diwilayah pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama ditempat kediaman pihak yang dipanggil.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan pemeriksaan sama dengan dalam perkara cerai talaq.

f. Kumulasi perkara

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Tata cara pemeriksaan kumulasi perkara ini sama dengan dalam perkara cerai talaq. Apabila tergugat mengajukan reconpensi maka diselesaikan menurut tatacara reconpensi.

g. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talaq.

h. Pembuktian

Pembuktian tentang alasan-alasan cerai gugat dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talaq, kecuali dalam hal:

- a. Cerai dengan Alasan Zina
- b. Pelanggaran Ta'lik talaq
- c. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.

i. Putusan

Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa:

- a. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai
- b. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti
- c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu “Putusan”.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

j. Biaya Perkara

Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat. Hal ini berada dengan Hukum acara perdata pada umumnya, yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah. Oleh karena dalam sengketa perkawinan dan perceraian tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, maka biaya perkara dibebankan pada penggugat selaku pencari keadilan. Jika dalam perkara ini ada rekompensi atau disertai dengan pembagian harta bersama suami-istri, biaya perkara dapat dipikul bersama oleh para pihak (dibebankan kepada penggugat dan tergugat bersama-sama).

k. Saat terjadinya perceraian

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Hakim Ketua Majelis membuat “PENETAPAN” yang isinya menyatakan perkawinan antar penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian terhitung mulai tanggal dan memerintahkan jurusita untuk memberitahukan kepada

para pihak. Keterangan tentang kekuatan hukum tetap dan terjadinya perceraian tersebut dicatat pada bagian bawah putusan cerai dan pada Register Induk Perkara yang bersangkutan.

l. Pemberitahuan kekuatan hukum tetap

Panitera berkewajiban memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa putusan cerai telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dengan demikian telah terjadi perceraian antara suami-istri yang bersangkutan.

m. Pemberian akta cerai

Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada pihak, memberikan akta cerai sebagai bukti kepada para pihak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹ Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan Penyelesaian perkara harta bersama pascaperceraian di Pengadilan Agama.

Di katakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai variabel.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara *purposive* (langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah pengadilan ini

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

²Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 65.

sudah menangani banyaknya kasus/masalah-masalah yang terkait dengan kasus harta bersama, perceraian, dan sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (hukum), apakah Proses penyelesaian perkara harta bersama pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng sudah sesuai atau tidak dengan peraturan dan dasar hukum Perundang-undangan yang berlaku.

adapun pendekatan yuridis itu yakni:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Selain pendekatan yuridis, peneliti juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mengacu kepada putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Sumber data yang diperoleh yakni berupa:

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.105

a. Data Primer, yaitu data-data pokok, terdiri dari:

1) Putusan Pengadilan

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang diambil dan sudah sesuai dengan permasalahan penulis, yakni Putusan No. 68/Pdt.G/2014/PA. BATG.

2) Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, yaitu: Muh. Amin T. S.Ag, M.H.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

- 5) Yurisprudensi;
- 6) Literature-literature Hukum:
 - a) Buku-buku;
 - b) Jurnal;
 - c) Website;
 - d) Artikel

c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yaitu kamus hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode *interview* (wawancara). Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni Hakim Aktif, dan Pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Bantaeng.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview terpimpin

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola mediating melengkapi kata-kata secara verbal. Menurut Mohammad Ali, keunggulan wawancara sebagai alat penelitian adalah:⁴

- a. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.
- b. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektivitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka.
- c. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data (dibandingkan dengan angket yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain).
- d. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui observasi terhadap obyek manusia.
- e. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung, sehingga memungkinkan

⁴ Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.119

diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.

Wawancara atau interview terpimpin⁵ dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Hakim serta pegawai yang bertugas pada lingkup Pengadilan Agama Bantaeng.

2. Dokumentasi

Dokumentasi/pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bantaeng.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara Hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bantaeng. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.⁶ Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.⁷

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

⁵Wawancara atau interviu terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84.

⁶Neong Muhajir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 306.

⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34.

1. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
2. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif dengan cara:

1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi dan di sajikan.

Setelah semua data terkumpul yang melalui wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Bantaeng¹

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI dan secara efektif telah terealisasi pada tanggal 5 Juli 2005 serentak di wilayah seluruh jajaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia.

Pengadilan Agama Bantaeng merupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1957, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam tahun 2010 telah menerapkan kebijakan secara umum, sebagai berikut :

¹Pengadilan Agama Bantaeng, “*Sejarah Pengadilan Agama Bantaeng*”, Official Website www.pa-bantaeng.go.id/v2/index.php/tentang-kami/sejarah.html. (11 Januari 2016)

1. Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi SIADPA Plus;
 2. Mengoptimalkan pelayanan hukum kepada publik dalam melayani para pencari keadilan, sehingga pencari keadilan merasa puas, aman dan nyaman berperkara di Pengadilan Agama Bantaeng;
 3. Menyediakan sarana penunjang situs website <http://www.pa-bantaeng.go.id> sebagai tindak lanjut dari SK KMA Nomor : 144//KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 4. Melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan/wati secara berkala;
 5. Terus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.
2. *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bantaeng*

Jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng yang diakui secara resmi oleh pemerintah, masyarakat Bantaeng mayoritas beragama Islam. Jika harus menyelesaikan berabagai persoalan hukum, baik perdata maupun pidana biasanya diselesaikan melalui ulama setempat. Masyarakat Islam Bantaeng, memang terbilang masyarakat yang agamis, taat dan patuh menjalankan Agama yang dianutnya, serta sangat menjunjung tinggi dan menghargai eksistensi para ulama sebagai tokoh masyarakat yang kharismatik. Oleh karena itu, ulama memegang peran penting. Di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ditanyakan dan diajukan oleh ulama untuk penyelesaiannya. Dan apapun yang diputuskan oleh ulama pasti menjadi pedoman bagi mereka. Kondisi dan alur penyelesaian setiap persoalan yang diperhadapkan kepada ulama, tidaklah seformal

dengan saat ini, ketika itu para ulama yang difungsikan sebagai gadhi (hakim), biasanya menjadikan serambi mesjid sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan kadang – kadang mereka melayani masyarakat di rumah mereka sendiri.

Keadaan dan tata cara penyelesaian persoalan masyarakat Islam seperti ini terus berlanjut, hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia menyadari betapa masyarakat muslim sangat membutuhkan lembaga peradilan yang resmi, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura, Melalui Peraturan Pemerintah inilah, Pengadilan Agama Bantaeng merupakan salah satu dari sejumlah Pengadilan Agama yang secara resmi dinyatakan berdiri.

Pertama berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng di Bissampole Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang pada waktu itu yang menjadi ketuanya adalah KH. Abd. Djabbar pada tahun (1962-1978) bangunannya masih berbentuk rumah panggung, selanjutnya kantor Pengadilan Agama Bantaeng berpindah tempat di Jalan Merpati Baru yang pada waktu itu di ketuai oleh Hj. Sitti Hasan pada tahun (1978-1979) kemudian setelah itu pindah lagi berkantor disebuah Balai Sidang yang terletak di Jalan Andi Mannappiang Nomor 1 Bantaeng. Sebuah bangunan kecil yang dibiayai oleh Departemen Agama sebagai Departemen Induk yang membawahi Pengadilan Agama, Kini dengan system satu atap semua lembaga peradilan di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sejak tanggal 25 Maret 2010 Pengadilan Agama Bantaeng secara resmi menempati sebuah kantor yang bagus dengan luas yang memadai setelah kantor tersebut diresmikan secara simbolis dengan sejumlah Kantor Pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang pembangunannya selesai diakhir tahun 2009. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada waktu itu DR. Harifin A.Tumpa, SH di Pontianak, Kalimantan Barat. Kantor tersebut tetap beralamat di Jalan Andi Mannappiang Nomor 1 Bantaeng sampai sekarang.

Pengadilan Agama Bantaeng, sejak secara resmi berdiri hingga saat ini telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang Ketua dan seorang pelaksana tugas. Terdiri dari :

1. KH. Abd. Djabbar (1962-1978);
2. Hj. Sitti Hasan (1978-1979);
3. KH. Zainul Abidin (1979-1982)
4. Drs. M. Thahir Hasan (1983-1991)
5. Drs. Umar Najamuddin (1991-1993) *Pelaksana Tugas*
6. Drs. Tahir.R (1993-1998)
7. Drs. Syarkawi (1998-2005)
8. Drs. H.M Nahiruddin Malle,S.H., MH. (2005-2006)
9. Drs. Sanusi Rabang, S.H., M.H. (2006-2009)
10. Drs. Hasbi Kawu, MH. (2009 - 2012)
11. H. Muh. Ramli HT, S.H. M.H. (2012 - 2014)
12. Drs. Hasbi,M.H. (2015 – Sekarang)

3. Visi dan Misi

Visi:

- a. Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai dibawah lindungan Allah SWT;

Misi:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedeqah dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan;

4. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Bantaeng telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.

Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Bantaeng dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng

Ketua : Drs. Hasbi, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Rahmat

Wakil Panitera : Dra. Hj. Nawiyah

Panitera Muda Gugatan : H. Erwin Amir Betha, S.H

Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Panitera Muda Hukum : Andi Suardi, S. Ag

Kepala Urusan Kepegawaian : Drs. Harifuddin

Kepala Urusan Perencanaan

dan Keuangan : Ansor

Kepala Urusan Umum : Askar

Pejabat Fungsional Hakim :

1. Musrifah, S.Hi
2. Ruslan Saleh. S.H
3. Muh. Amin T, S.Ag., S.H.
4. Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti :

1. Siti Jamilah, S.H.
2. Bungatang, S.HI

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantaeng

Proses pemeriksaan Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantaeng sama halnya dengan proses pemeriksaan perkara perdata tertentu khususnya untuk yang beragama Islam diberbagai Pengadilan Agama di Indonesia.²

Sebelum proses pemeriksaan penyelesaian perkara harta bersama berjalan Hakim memeriksa surat permohonan atau surat gugatan terlebih dahulu. Hakim memeriksa apakah isi surat permohonan atau surat gugatan itu sudah memenuhi

² Amin, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, wawancara pribadi, Bantaeng, 11 Januari 2016

beberapa hal yaitu identitas para pihak, posita dan fundamentum petendi, petitum atau tuntutan, serta memeriksa yuridiksi relatif surat gugatan atau surat permohonan yang diajukan atau apakah telah sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan Peradilan.

Apabila telah melewati tahap tersebut Hakim tetap berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak walaupun perkara tersebut perihal harta bersama.³ Apabila terjadi kemufakatan antara keduanya maka proses pemeriksaannya dihentikan dan gugatan tersebut dicabut.⁴ Apabila Hakim berhasil mendamaikan, gugatan tersebut umumnya dicabut maka dibuatlah akta perdamaian, gugatan tersebut umumnya dicabut maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati perdamaian tersebut, kekuatannya sama dengan putusan, mengikat dan dapat dieksekusi.

Sedangkan apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan maka proses persidangan tetap berjalan yang berlanjut keperihal jawaban tergugat, replik, duplik serta pembuktian. Hakim wajib memeriksa satu demi satu benda-benda yang disebutkan dalam dasar tuntutan petitum, apakah benar-benar ada hubungan hukumnya sehingga dapat dinyatakan menjadi harta bersama dan berusaha menemukan peristiwa (*feitfender, fact finding*), sehingga diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Pemeriksaan pembuktian ini adalah berdasarkan bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perihal perkara harta bersama Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yaitu pemeriksaan mengenai perkara-perkara oleh Hakim karena

³ Nurul ulum, Pegawai Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara pribadi, Bantaeng, 11 Januari 2016

⁴ Amin, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, wawancara pribadi, Bantaeng, 11 Januari 2016

jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Dalam perkara harta bersama ini, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim ketua persidangan adalah berkenaan dengan letak gedung atau rumah serta batas-batas tanah yang dinyatakan oleh penggugat atau pemohon sebagai harta bersama dalam isi petitum. Setelah melakukan pemeriksaan setempat, Hakim pun meminta keterangan ahli (*expertise*)/saksi ahli yang bertujuan untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri. Pada umumnya Hakim menggunakan keterangan seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang berkenaan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setelah semua proses pemeriksaan pembuktian selesai, maka Majelis Hakim dapat mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan akhir guna menyelesaikan perkara yang diajukan.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantaeng

Putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg. Dan demi menjaga nama Pemohon/penggugat ataupun Termohon/tergugat, maka identitas kedua belah pihak yang bersengketa penulis samarkan.

P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Panoang, Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat;

M e l a w a n

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Korong Batu, Rt. 01, Rw. 01, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg, tertanggal 2 April 2014 dengan perubahan yang dilakukan oleh penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng dengan bukti Akta Cerai Nomor: 44/AC/2014/PA.Batg tertanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
 - 1) Bahwa berupa tanah kebun dan sawah pemberian Nenek Penggugat yang bernama Hj. Sada pada tanggal 15 Pebruari 1999 dengan luas kurang lebih 50 are, yang terletak di Balecco, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik H. Hasan
 - b. Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan dan Pangnge
 - c. Sebelah Barat : Tanah milik H. Hasan dan Hj. Alang
 - d. Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan

Harga sekarang ditaksir Rp 50.000.000,-

- 2) Harta bersama tersebut, adalah sebidang tanah yang di beli Penggugat dari saudaranya Tergugat yang bernama Samsu pada tanggal 7 Juni 2003, dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara 2 kali angsur, angsuran pertama sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan angsuran kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan luas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik Yapi
- b. Sebelah Selatan : Tanah milik Salama
- c. Sebelah Barat : Tanah milik Jalan
- d. Sebelah Timur : Tanah milik H. Rate dan sungai

- 3) Sebuah rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, diserahkan kepada anak Penggugat yang kini di asuh oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Tanah milik Cina
- c. Sebelah selatan : Tanah milik Hj. Caya
- d. Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Indo Te

- 4) Bahwa Penggugat membeli Motor Merk Jupiter Z dengan harga Rp.13.000.000 dan telah di jual oleh Tergugat setelah Penggugat berada di Kalimantan;
 - 5) Uang usaha batu Merah milik Penggugat yang di pakai oleh Tergugat sebesar Rp.30.000.000
3. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, begitu pula harta pemberian Nenek Penggugat yang bernama Hj.Sada sebagaimana diuraikan di atas hingga saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat;
 4. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat telah beberapakali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
 6. Bahwa apabila harta bersama in casu obyek sengketa No. 1 tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat akan mengalihkan harta bersama (obyek sengketa No. 1), harta bawaan Penggugat (obyek sengketa No. 2), Oleh

karena itu, demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk diletakkan sita jaminan atas semua barang obyek sengketa tersebut di atas;

8. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah pemberian Nenek Penggugat yang bernama Hj. Sada yang berupa sawah seluas 75 are dan kebun seluas 75 are adalah harta bawaan;
3. Menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari saudara Tergugat yang bernama Samsu pada poin 4 adalah harta bersama;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bawaan berupa tanah sawah dan kebun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural maka akan dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut akan di bagi dua;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa No. 1, obyek sengketa No. 2 dan obyek sengketa No. 3 adalah sah dan berharga;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama yang dilaksanakan tanggal 24 April 2014, penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 21 April 2014, kemudian Ketua majelis memerintahkan kepada Jurusita memanggil sekali lagi kepada tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Drs. Rahmat sebagai mediator Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg, namun berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 5 Juni 2014 ternyata tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan penggugat dan selanjutnya penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap gugatannya sebagaimana perubahan tersebut di muka;

Bahwa majelis Hakim setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg, maka ditemukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bahwa dalam posita gugatan pada poin 1, penggugat menyatakan bahwa penggugat mempunyai tanah kebun dan sawah dari pemberian nenek penggugat yang bernama Hj. Sada pada tanggal 15 Pebruari 1999;

Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan pada posita gugatan poin 2, penggugat mempunyai tanah dengan luas kurang lebih 1 Ha yang terletak di Dusun Bonto Sunggu, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa penggugat mendalilkan penggugat telah membeli Motor Merek Juviter Z dengan harga Rp. 13.000.000, dan telah dijual oleh tergugat setelah tergugat berada di Kalimantan;

Bahwa posita gugatan pada point 1, 2, dan 4 sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), menimbulkan kerancauan berfikir yaitu dengan menyebutkan adanya harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh setelah perkawinan namun setelah majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai keberadaan semua harta yang didalilkan oleh penggugat, ternyata penggugat mengakui di depan Majelis Hakim bahwa semua harta penggugat telah dijual oleh tergugat sebelum penggugat memasukkan gugatan penggugat ke Pengadilan Agama Bantaeng pada saat itu penggugat sedang berada di Kalimantan;

Bahwa pada petitum gugatan, penggugat meminta untuk menyerahkan separuh harta yang dikuasai oleh tergugat namun pada kenyataanya harta tersebut telah beralih/dijual oleh tergugat kepada pihak ketiga, dan penggugat tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang sekarang menguasai harta bersama penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak menjadikan sebagai tergugat atau sekurang-kurangnya sebagai turut tergugat (*error in persona*) padahal dalam petitum yang dimohon oleh penggugat agar menyerahkan harta bersama yang sekarang dikuasai oleh tergugat;

Bahwa oleh karena posita gugatan dalam perkara ini *obscuur libel*, sedang ternyata hal tersebut adalah pilar dari posita gugatan selanjutnya, maka point-point selanjutnya secara otomatis kabur karena bertaut langsung dengan point-point tersebut.

Bahwa mengenai posita gugatan penggugat pada poin 7 tentang diletakkan sita jaminan atas semua barang obyek sengketa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 September 2014, yang amarnya menolak permohonan sita penggugat;

Bahwa oleh karena posita gugatan dalam perkara ini *obscuur libel*, sedang ternyata hal tersebut adalah pilar dari posita gugatan selanjutnya, maka point-point selanjutnya secara otomatis kabur karena bertaut langsung dengan point-point tersebut.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah antara lain :.....10. penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng serta obyek sengketa terletak di Kabupaten Bantaeng, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng (vide Pasal 420 RBg);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBg. Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara

damai namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kewajiban pihak-pihak berperkara menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan ternyata kedua belah pihak sepakat memilih Drs. Rahmat sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator tersebut melaksanakan mediasi yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2014 bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya oleh Ketua Majelis Hakim, penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap gugatannya sebagaimana perubahan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada poin 1, penggugat menyatakan bahwa penggugat mempunyai tanah kebun dan sawah dari pemberian nenek penggugat yang bernama Hj. Sada pada tanggal 15 Pebruari 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan pada posita gugatan poin 2, penggugat mempunyai tanah dengan luas kurang 1 Ha yang terletak di Dusun Bonto Sunggu, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbanmg, bahwa selain itu penggugat mendalilkan penggugat telah membeli Motor Merek Juviter Z dengan harga Rp. 13.000.000, dan telah dijual oleh tergugat setelah tergugat berada di Kalimantan;

Menimbang, bahwa posita gugatan pada point 1, 2, dan 4 sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), menimbulkan kerancuan berfikir yaitu dengan menyebutkan adanya harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh setelah perkawinan namun pada petitum penggugat tidak mencantumkan sesuai apa yang dituntut dalam posita;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan penggugat pada poin 7 tentang diletakkan sita jaminan atas semua barang obyek sengketa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 September 2014 yang amarnya menolak permohonan sita penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai semua harta yang didalilkan oleh penggugat, namun ternyata tergugat mengakui di depan Majelis Hakim bahwa semua harta penggugat telah dijual oleh tergugat sebelum penggugat memasukkan gugatan penggugat di Pengadilan Agama Bantaeng pada saat itu penggugat sedang berada di Kalimantan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta penggugat telah beralih dipihak ketiga dan penggugat tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang sekarang menguasai harta bersama penggugat dan tergugat, dan lagi pula yang semestinya digugat oleh penggugat adalah nilai atau harga harta bersama penggugat dengan tergugat yang telah dijual tergugat kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” demikian juga Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, yang menyatakan “ Petitum tidak sesuai dengan posita, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena posita gugatan dalam perkara ini dinyatakan *obscur libel* sedang ternyata menjadi pilar dari posita gugatan selanjutnya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa point-point selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu Tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 29 Zulkaidah 1435 H., oleh H. Muh. Ramli, HT, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha, S.H. M.H. dan Muh. Amin T, S.Ag., SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri tergugat, diluar hadirnya penggugat.

3. Alasan Majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg

Bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang

dimaksud “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah antara lain:⁵

Berdasarkan Hasil putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg Hakim menolak perkara yang diajukan oleh penggugat dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatan pada point 1, 2, dan 4 sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), menimbulkan kerancuan berfikir yaitu dengan menyebutkan adanya harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh setelah perkawinan namun pada petitum penggugat tidak mencantumkan sesuai apa yang dituntut dalam posita.⁶ setelah majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai semua harta yang didalilkan oleh penggugat, namun ternyata tergugat mengakui di depan Majelis Hakim bahwa semua harta penggugat telah dijual oleh tergugat sebelum penggugat memasukkan gugatan penggugat di Pengadilan Agama Bantaeng.

Dan mengenai harta penggugat telah beralih ke pihak ketiga dan penggugat tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang sekarang menguasai harta bersama penggugat dan tergugat, dan lagi pula yang semestinya digugat oleh penggugat adalah nilai atau harga harta bersama penggugat dengan tergugat yang telah dijual tergugat kepada pihak ketiga. Dan Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974.

⁵Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, (Makassar, Alauddin University Press, 2014) h. 238

⁶Amin, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, wawancara pribadi, Bantaeng, 11 Januari 2016 S

C. Analisa Penulis

Pada perkara ini penggugat telah resmi bercerai pada tanggal 19 Maret 2014 dengan bukti akta cerai Nomor: 44/AC/2014/ PA.Batg. Sedangkan gugatan pembagian harta bersama pengajuannya terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bantaeng pada register nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg pada tanggal 24 Maret 2014. Yang secara yuridis formal telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama.

Mengenai hasil pada putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dengan alasan gugatan Penggugat dianggap kabur (*Obscuur libel*) dan tidak jelas.

Berdasarkan putusan majelis Hakim pada perkara harta bersama dalam putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg, peneliti menganggap bahwa putusan majelis Hakim telah sesuai dengan pertimbangan Undang-Undang dan Yurisprudensi yang telah ada sehingga peneliti sepakat dan sepaham dengan putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan tersebut. Dengan alasan bahwa perkara mengenai harta bersama yang diajukan oleh penggugat ternyata objeknya sudah tidak jelas karena telah berpindah ke pihak yang lain. Dalam hal ini tergugat telah menjual semua obyek yang disengketakan oleh penggugat dikarenakan untuk memenuhi biaya hidup tergugat dan anak-anaknya, yang pada saat itu penggugat berada di Kalimantan dan tidak memberi nafkah kepada tergugat dan anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai pembagian harta bersama pascaperceraian serta implementasinya dalam putusan di Pengadilan Agama Bantaeng. Penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim dalam putusan No. 68/Pdt.G/2014/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu menolak gugatan penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, demikian juga Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975.
2. Alasan Majelis Hakim menolak Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg karena gugatannya kabur dan tidak jelas dan bahkan menimbulkan kerancauan berpikir terhadap Harta Bersama yang sudah dijual oleh Tergugat sebelum gugatan diajukan, semestinya yang digugat oleh penggugat adalah nilai atau harga harta bersama yang telah dijual oleh tergugat.

B. Saran

1. Mengetahui dan memahami makna perkawinan serta akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan itu berlangsung tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi perceraian.

2. Bagi Majelis Hakim, diharapkan putusan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Bagi pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan agar sebelum perkawinan itu berlangsung calon pasangan suami-istri diberikan penyuluhan hukum mengenai harta bersama dan pembagaian harta bersama itu pascaperceraian sehingga dapat memudahkan proses pembagian harta bersama tanpa adanya persengketaan terlebih dahulu dan akibat hukum lainnya pasca perceraian terjadi.
4. Bagi Masyarakat setidaknya lebih memperhatikan keberadaan obyek bendanya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. (Jakarta : Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Quran,2002).
- Amin, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 11 Januari 2016
- Arto, Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*.(Jakarta: Pustaka Pelajar,1996).
- Ali, Zainuddin. *Hukum perdata Islam di Indonesia*,Cet. I (Palu ;Sinar Grafika,2006).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
- Anshary, M. *Hukum perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, . (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).
- Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia,2002)
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana,2008).
- Muhajir, Neong. *Metedologi Penelitian Kualitatif* . (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998).
- Harahap, Hahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nur, Djaman. *Fiqih munakahat*. (Bengkulu: Dina utama semarang,1993).
- Rofik, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Ed. Revisi cet. I;Jakarta:Rajawali Pers, 2013).
- Rahman, Abd. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta; Akademika presindo, 1995).

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Peradilan Agama, dalam *himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermassa, 1991).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sopyan, Yayan. *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Makassar : Aluddin University Press, 2014)

Suharso dan Retnoningsih Ana *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang; Widya Karya. 2005).

Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:Citra Umbara:tt).

Thahir M. Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Makassar; Alauddin University Press. 2012)

Ulum Nurul, Pegawai Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 11 Januari 2016

Pengadilan Agama Bantaeng, “*Sejarah Pengadilan Agama Bantaeng*”, Official Website www.pa-bantaeng.go.id/v2/index.php/tentang-kami/sejarah.html (11 Januari 2016)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Ridwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, (Bandung; Alfabeta, 2009)

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *metodologi penelitian*, (Cet. VIII : Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Peneliti Skripsi “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg.”

Objek Penelitian : Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng

Hari/Tanggal : Senin, 11 Januari 2016

Masalah Pokok Dalam Skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng dalam Perkara putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg?
- b. Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia?
- c. Apa alasan Majelis Hakim menolak gugatan dalam Perkara Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg?

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Proses pemeriksaan Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantaeng sama halnya dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama lainnya?
2. Apakah Majelis Hakim tetap berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak walaupun perkara tersebut perihal harta bersama?
3. Dalam perkara harta bersama ini apakah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat?
4. Dalam Perkara Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Batg tentang harta bersama apakah Suami bekerja dan isterinya tidak bekerja, Isteri bekerja dan suami tidak bekerja, atau keduanya sama-sama bekerja. Dan bagaimana proses pembagiannya?

M A K A S S A R

PENGADILAN AGAMA BANTAENG
Jl. Andi Mannappiang No 1, Bantaeng. Telp./Fax. (0411) 321181
BANTAENG

KETERANGAN PENELITIAN

Menerangkan bahwa

Nama	: NURSYAMSI
NIM	: 10100112066
Pekerjaan	: Mahasiswa
Perguruan Tinggi	: Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Peradilan Agama
Alamat	: Samata

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantaeng, Jl. Andi Mannappiang No. 1, Kabupaten Bantaeng. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B (Studi kasus Putusan 68/Pdt.G/2014/PA.Batg)** yang dimulai pada tanggal 11 Januari dan berakhir 13 Februari 2016.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 13 Februari 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Wakil Panitera PA. Bantaeng

Dra. Hj. Nawiyah
NIP :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl.Sl.Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp.(0411) 424835

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Nurul Ulum, S.E.;
Alamat : Bantaeng
Pekerjaan : Pegawai PA Bantaeng

Menerangkan bahwa

Nama : Nursyamsi
Nim : 10100112066
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama
Alamat : Samata

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Bantaeng."

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDIN
M A K A

Bantaeng, 11 Januari 2016

Yang diwawancarai



Muh. Nurul ulum, S.E.;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/46/2016

Gowa, 6 Januari 2016

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada:

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat di sampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nursyamsi

Nim : 10100112066

Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama

Semester : (VII) Tujuh

Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

"Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng"

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing., HT., M.S.**

2. Andi Intan Cahyani., S.Ag, M.Ag.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 s.d 11 Maret 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.

RIWAYAT HIDUP



Nama	: NURSYAMSI
TTL	: Bongkina, 28 Juli 1994
NIM	: 10100112066
Alamat	: Perm. Paccinongang Harapan
Asal	: Desa Tenete Kec. Tompobulu Kab. Gowa
Facebook	: Chi (Noersyamsi)
Email	: Noersyamsi918@yahoo.com
Telpon	: 082316092404

Penulis mengenal pendidikan formal pertama pada tahun 2000 di SD Inpres Pajagalung Desa Tanete. Di tahun 2007 penulis melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yapit Malakaji. 3 (tiga) tahun kemudian menyelesaikan di Madrasah tepatnya pada tahun 2010. Di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Malakaji. 3 (tiga) tahun pula penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Malakaji di tahun 2012, dalam penimbaan ilmu di tiga tahun terakhir sebelum masuk ke perguruan tinggi, penulis banyak mendapat pengalaman dan bagaimana rasanya berjuang untuk hidup.

Di tahun yang sama, penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Penulis lulus di UIN Alauddin tepatnya jurusan Peradilan Agama. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan Perguruan Tinggi di UIN Alauddin dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh baik dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama dapat menjadi bekal dunia dan akhirat, terlebih dengan mengamalkannya pula. Teruntuk kedua orang tuaku beserta kakak dan Adikku terima kasih atas semuanya yang kalian berikan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.